

Terjebak Kebakaran, Penghuni Rumah Loncat dari Lantai 2 dan Kakinya Patah

JAKARTA (IM) - Kebakaran melanda tiga rumah di Jalan Rawa Simprug III, RT/RW 07/05, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa (14/3) dini hari WIB.

Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Selatan mencatat dua orang yang menjadi korban dalam insiden kebakaran tersebut. Seorang penghuni rumah mengalami patah kaki setelah meloncat dari lantai 2 untuk menghindari kobaran api.

"Satu korban luka mengalami patah kaki akibat meloncat dari lantai dua rumah untuk menyelamatkan diri," kata Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Ruwanto.

Selain itu, ada juga satu korban tewas di tempat kejadian perkara (TKP) akibat tak bisa meloloskan diri dari kobaran api.

"Satu korban tewas merupakan seorang wanita berinisial BS (55) yang tinggal di lokasi kejadian," katanya.

Kompol Widya Agustiono menuturkannya bahwa satu korban yang mengalami patah kaki saat ini telah dirawat di RSUP Fatmawati.

Menurut dia, korban yang belakangan diketahui

bernama Agus Kasbianto tersebut adalah salah satu pemilik rumah yang terdampak kebakaran. Agus terpaksa melompat dari ketinggian karena 'si jago merah' telah membesar dan membakar sebagian area lantai satu rumahnya.

"Peristiwa kebakaran terjadi sekira pukul 03.30 WIB. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, Agus Kasbianto melompat dari lantai dua rumah saat api mulai membesar," ujar Widya Agustiono.

"Akibat lompatan tersebut, Agus Kasbianto mengalami patah kaki sebelah kanan," imbuh dia.

Sudin Gulkarmat menerjunkan 16 unit mobil untuk memadamkan api. Tak kurang ada 60 personel yang dikerahkan untuk meredam 'Si Jago Merah'. Sesampainya di lokasi, petugas lantas melakukan pemadaman di area seluas 48 meter persegi. Petugas setidaknya membutuhkan waktu selama 90 menit untuk membuat api benar-benar padam. Peristiwa kebakaran ini pada akhirnya mengakibatkan enam keluarga atau 19 korban jiwa terdampak. Total kerugian ditaksir mencapai Rp 200 juta. ● yan

BPN DKI Jakarta Tegaskan Hindari Gaya Hidup Hedon

JAKARTA (IM) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DKI Jakarta mengingatkan jajarannya sesuai instruksi Menteri Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto yang menginstruksikan kepada seluruh Kakanwil dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) se-Indonesia agar tidak bergaya hidup hedon alias mewah.

Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) beberapa waktu lalu. Saat itu, mantan Panglima TNI itu secara tegas dan khusus memberikan arahan, ajakan dan imbauan untuk tidak bergaya hedonis di tengah tengah kesulitan hidup masyarakat.

"Pak Menteri dan pak Wamen di acara raker nasional beberapa waktu lalu telah secara khusus dan tegas memberikan arahan, ajakan dan imbauan untuk tidak bergaya hedonis. Maka kami dari Kanwil (Kantor Wilayah) BPN DKI Jakarta menindaklanjuti arahan dari pak Menteri," terang Kakanwil BPN DKI Jakarta, Wartomo dalam keterangannya, Selasa (14/3).

Ia menambahkan, sesuai arahan dan instruksi dari Menteri ATR/BPN yang menekankan agar jajaran di Kementerian ATR/BPN tidak memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup yang berlebihan, serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepatantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.

Kanwil BPN DKI Jakarta sudah mengumpul-

kan seluruh kepala Kantor Pertanahan di wilayah Jakarta, agar mentaati imbauan dan instruksi dari menteri ATR/BPN tersebut.

"Imbauan untuk tidak hidup hedon ini juga berlaku bagi anggota keluarga dari pegawai BPN di jajaran Kanwil BPN Jakarta," tegas Wartomo.

Tak hanya imbauan secara lisan, Kanwil BPN DKI Jakarta juga sudah membuat surat edaran terkait larangan hidup hedonis di lingkungan BPN.

"Kita juga sudah membuat surat edaran terkait larangan gaya hidup hedonis di lingkungan pegawai BPN Jakarta, termasuk anggota keluarga dari pegawai BPN," kata mantan Kakanwil BPN Jambi dan Gorontalo ini menegaskan.

Ia juga meminta seluruh ASN di jajaran Kanwil BPN DKI Jakarta bekerja dan melayani masyarakat secara profesional, sesuai dengan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN, dan berkomitmen untuk menjadi penyelenggara negara yang bersih dan menjaga integritas serta nama baik institusi.

Tak hanya itu, dalam surat edaran itu, Kanwil BPN DKI Jakarta juga meminta kepada seluruh jajaran agar berperilaku jajan hidup sederhana, tidak memperlihatkan kemewahan dan atau sikap hidup berlebihan, serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepatantasan sebagai bentuk rasa empati kepada masyarakat dan berikap rendah hati dan berkakyat. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



SERAH TERIMA BUS LISTRIK

Presiden Komisaris PT VKTR Teknologi Mobilitas, Anindya N Bakrie (kedua kanan) didampingi Presiden Direktur PT Mayasari Group Ade Ruhya Mahfud (kiri) melihat bus listrik usai serah terima 22 bus listrik di Pool Bus Mayasari Bakti, Cibubur, Jakarta, Selasa (14/3). PT VKTR Teknologi Mobilitas menyerahkan 22 unit bus listrik kepada PT Mayasari Bakti dengan merk BYD jenis K-9 lowdeck sebagai upaya mendukung pemerintah melakukan transisi menuju elektrifikasi transportasi.

Kepulauan Seribu Targetkan Penyelesaian PTSL 2023 Tercepat

Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Taufik Suroso Wibowo mengatakan, pihaknya terus melakukan percepatan pensertifikatan dan pemetaan bidang tanah dalam program PTSL di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

JAKARTA (IM) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menjadi kantor pertanahan tercepat dalam menyelesaikan target kinerja di jajaran Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta 2023 dalam penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Taufik Suroso Wibowo mengatakan, pihaknya terus melakukan percepatan pensertifikatan dan pemetaan bidang tanah

dalam program PTSL di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Pihaknya juga menargetkan tahun ini Kabupaten Kepulauan Seribu yang masuk wilayah kerja BPN Jakarta Utara akan menjadi Kabupaten Lengkap. Yaitu, seluruh bidang tanah di daerah tersebut sudah terpetakan.

"Target kami tahun ini Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Lengkap di Jakarta, di mana seluruh bidang tanah di daerah tersebut sudah terpetakan semuanya," terang Taufik dalam keterangan yang diterima Selasa (14/3). Ia mengatakan, PTSL

adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah Kelurahan atau desa untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Taufik menjelaskan, metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan. "Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018," jelas mantan kepala kantor Pertanahan Surabaya, Jawa Timur ini.

Taufik yang pernah menjadi kepala kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau ini menegaskan, seluruh target PTSL untuk

Kantor Pertanahan Jakarta Utara plus Kepulauan Seribu akan dituntaskan pertengahan tahun 2023 sebanyak 2.885 bidang tanah yang tersebar di beberapa Kelurahan di Jakarta Utara.

Ia menjelaskan, meski baru memasuki awal bulan Meret 2023 namun saat ini pihaknya sudah berhasil menyelesaikan sertifikat PTSL sebanyak 1.385 bidang dan siap diserahkan kepada masyarakat, dan sisanya dalam pengumuman sebanyak 1.500 bidang.

"Kami menargetkan, pertengahan tahun ini seluruh target PTSL 2023 akan selesai sebanyak 2.885 bidang," tegas Taufik.

Taufik mengungkapkan, kantor Pertanahan Jakarta Utara menggandeng aparat penegak hukum dan stakeholder untuk ikut mengawasi proses pelaksanaan program PTSL 2023 agar program tersebut tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan bersih dari aksi pungli.

"Kita sengaja menggandeng aparat penegak hukum dan stakeholder untuk ikut mengawasi program PTSL 2023, agar program tersebut benar benar tepat sasaran, akuntabel, transparan dan bersih dari aksi pungli, baik di lingkungan BPN maupun di daerah yang menerima program PTSL," terang Taufik. ● yan

Usulan DPRD Bekasi Mengganti Penjabat Bupati Dinilai Tak Mendasar

BEKASI (IM) - Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat secara diam-diam untuk mengganti Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan dari posisi saat ini dinilai tidak mendasar.

Usulan itu diketahui usai surat DPRD Kabupaten Bekasi Nomor RT.04/360-DPRD yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri perihal usulan calon nama Penjabat Bupati Bekasi, tersebar luas di media sosial meski kementerian terkait tidak menginstruksikan pergantian jabatan dimaksud.

"Yang mengusulkan siapa? Kan dewan, pernah diajak ngobrol tidak? Tidak pernah diajak ngobrol, intinya pengusulan dewan sendiri juga kami harus tahu pertimbangannya dan saya tidak mengetahui dasar pertimbangan dewan," kata pejabat eselon dua Pemkab Bekasi, Rahmat Atong yang namanya diusulkan.

DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong, serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Koswara sebagai calon pengganti Dani Ramdan. Surat resmi lembaga legislatif itu diketahui tidak sepenuhnya merupakan keputusan bulat pimpinan DPRD. Banyak di antara mereka yang enggan menanggapi soal surat usulan tersebut.

"Yang tanda tangan ketua, hubungi ketua. Kop surat juga tanda tangan ketua, ada tidak tanda tangan saya di situ? Tidak ada," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, Uryan Riana.

Uryan juga mengaku tidak mengetahui dasar pertimbangan DPRD mengusulkan tiga nama calon pengganti Penjabat Bupati Bekasi, sebab

ia tidak mengikuti rapat pembahasan dimaksud.

"Ini mah usulan saja, kalau sebabnya tanya langsung ke ketua, karena saya tidak ikut rapat di dalamnya, tahu-tahu ada nama tiga orang, saya juga bingung," ujarnya lagi.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PAN-PBB DPRD Kabupaten Bekasi, Jamil.

"Bagusnya konfirmasi ke pimpinan DPRD, karena itu surat pakai kop surat pimpinan DPRD, tidak elegan kalau saya yang menyampaikan. Saya juga tidak berkenan kalau menyampaikan itu, sudah itu ke ketua saja," ujarnya pula.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah membenarkan surat yang dilayangkan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri tertanggal 28 Februari 2023 perihal calon nama Penjabat Bupati Bekasi.

"Iya benar surat tersebut, nanti ya, saya lagi banyak tamu di rumah, baru pulang umrah," katanya lagi.

Sementara itu, Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengaku telah mengonfirmasi informasi tersebut kepada kedua kepala dinas yang diusulkan. Hasil konfirmasi, keduanya mengaku tidak mengetahui telah diusulkan oleh DPRD. "Setelah saya konfirmasi, mereka tidak tahu-menahu dengan pengusulan itu karena katanya mereka tidak dikonfirmasi kembali ke orang yang bersangkutan. Itu hak dewan, saya tidak ikut campur," katanya pula.

"Kalau terkait ASN, duaduanya sudah saya panggil dan tanya ke mereka, apakah ada upaya politik. Karena jika ada upaya politik itu salah, saya hanya ingatkan ini ranah politik, ASN tidak boleh berpolitik. Kalau memang berminat menjadi penjabat bupati, silakan ditempuh, nanti saya sampaikan ke Gubernur," demikian Dani Ramdan. ● yan

Heru Budi: Mundurnya Dirut Transjakarta Alasan Kesehatan

JAKARTA (IM) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak mempersoalkan mundurnya Direktur Utama PT Transjakarta, Kuncoro Wibowo. "Ya kalau orang mau ngundurin diri ya gapapa," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/3).

Ia mengatakan, sempat menerima surat pengunduran diri Kuncoro. Menurutnya, ada alasan kesehatan yang membuat Kuncoro mundur Dirut TJ. "Urusan kesehatan apa apa? Belum baca suratnya," jelasnya.

Sebelumnya, Kuncoro Wibowo baru dilantik menjadi Dirut Transjakarta pada 11 Januari 2023 lalu. Ia

menggantikan Dirut sebelumnya yakni Yana Aditya yang menjabat di era akhir masa kepemimpinan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Mantan Direksi PT KAI itu diberi waktu tiga bulan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membereskan masalah di Transjakarta terutama soal keselamatan dan keamanan penumpang. "Ya harus ada peningkatan, targetnya tiga bulan ke depan. Nanti ditagih lagi ya tiga bulan ya," ujar Heru pada Jumat (13/1).

Sementara itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Badan Pembina (BP) BUMD Provinsi DKI

buntut pengunduran diri Kuncoro ini. Pemanggilan itu untuk mengetahui alasan pengunduran diri Kuncoro.

"Paling tidak kami panggil BP BUMD untuk mempertanyakan kenapa alasannya ini, karena kami juga ngak tahu alasan konkretnya. Kalau tadi kan katanya tidak mampu karena menangani masalah yang ada. Dari situ kan harus diungkap masalahnya itu apa sehingga ini akan menjadi acuan ketika kita nanti ada seleksi calon penggantinya, kami minta orang yang memang bisa menangani ini," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail kepada wartawan, Selasa (14/3). ● yan

FOTO: ANTARA



PELAPORAN SPT PAJAK

Pegawai melayani wajib pajak yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet, Jakarta, Selasa (14/3). Wajib Pajak (WP) diberikan tenggat hingga 31 Maret 2023 untuk melaporkan SPT Pajak.

INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 31 Maret 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

Kantor Cabang Pembantu PIP Salodong

Jalan Raya Salodong, Untia, Biringkanaya Makassar

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin Kantor Cabang Makassar (0411) 3620740

Hormat Kami,
PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin